



**panrb**

KEMENTERIAN  
PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA  
DAN REFORMASI BIROKRASI

# LAPORAN HASIL EVALUASI SPBE TAHUN 2024

## PEMERINTAH KAB. PASANGKAYU



*Sinergi untuk Indonesia Maju*

## KATA PENGANTAR

Puji syukur dihaturkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat dan karunia-Nya sehingga seluruh agenda tahapan Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) dapat dilaksanakan pada Tahun 2024. Pelaksanaan kegiatan evaluasi SPBE merupakan amanat Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) yang dikoordinasikan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dengan tujuan untuk mengukur kemajuan dan meningkatkan kualitas penerapan SPBE pada Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah, serta meningkatkan kualitas pelayanan publik pada Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah.

Besar harapan kami bahwa hasil evaluasi SPBE tahun 2024 dapat menggambarkan progres kemajuan penerapan SPBE di Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah, sehingga memberikan panduan bagi Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah untuk peningkatan penerapan SPBE dalam rangka keterpaduan penerapan SPBE yang selaras dengan kebijakan nasional. Dengan semangat tersebut, maka dampak terciptanya layanan SPBE berkualitas, terintegrasi, dan berdaya guna yang mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi bagi Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah, serta bermanfaat bagi masyarakat luas dapat diwujudkan secara konkret.

Kami mengucapkan terima kasih dan apresiasi sebesar-besarnya atas upaya yang telah dilakukan oleh seluruh Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah untuk terus meningkatkan progres penerapan SPBE, serta sinergi yang baik antara Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dengan seluruh pemangku kepentingan, termasuk Kementerian/Lembaga anggota Tim Koordinasi SPBE Nasional dan Tim Asesor Eksternal Perguruan Tinggi, sehingga pelaksanaan Evaluasi SPBE tahun 2024 dapat dilaksanakan dengan baik dan berjalan lancar.

Jakarta, 1 Januari 2025



Ditandatangani secara elektronik oleh :

**NANIK MURWATI**

Deputi Bidang Kelembagaan dan Tata  
Laksana

NIP. 197208081996032001

# EVALUASI SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK TAHUN 2024

## Ringkasan Eksekutif

Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) merupakan penyelenggaraan pemerintahan yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memberikan layanan kepada Pengguna SPBE. Untuk memastikan pelaksanaan SPBE di Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah selaras dengan prinsip terintegrasi dan terpadu, maka Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah diharapkan menerapkan unsur-unsur SPBE sesuai dengan kerangka kerja Tata Kelola SPBE dan Manajemen SPBE agar penerapan SPBE dapat berjalan efektif, efisien, dan berkesinambungan, serta dapat menghasilkan layanan SPBE yang berkualitas dan optimal. Untuk mengukur perkembangan penerapan SPBE di Indonesia, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi bersama Tim Koordinasi SPBE Nasional melaksanakan Evaluasi SPBE. Pada tahun 2024, telah dilaksanakan Evaluasi SPBE dengan menggunakan instrumen sebagaimana telah diatur melalui Peraturan Menteri PANRB Nomor 59 Tahun 2020 tentang Pemantauan dan Evaluasi SPBE.

Hasil pelaksanaan evaluasi SPBE yang dilakukan pada tahun 2024 sebagaimana terlampir dalam Laporan Hasil Evaluasi SPBE ini, diharapkan dapat dimanfaatkan dalam menentukan arah tindak lanjut yang harus dilakukan dalam mendorong peningkatan penerapan SPBE secara menyeluruh pada Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah di masa mendatang, dalam rangka meningkatkan kualitas layanan SPBE kepada masyarakat dan terwujudnya Pemerintah Digital dalam kerangka Transformasi Digital Pemerintah.

## Dasar Hukum

- Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik.
- Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Birokrasi Reformasi Nomor 59 Tahun 2020 tentang Pemantauan dan Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik.
- Pedoman Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 3 Tahun 2024 tentang Tata Cara Pemantauan dan Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik.

## Metodologi Evaluasi SPBE

Penerapan SPBE diukur dengan model tingkat kematangan SPBE, di mana setiap tingkat kematangan akan dideskripsikan dengan suatu kriteria yang menggambarkan karakteristik kapabilitas proses dan kapabilitas fungsi teknis SPBE yang terdiri atas 5 (lima) tingkatan, di mana semakin tinggi tingkat kematangan yang dimiliki oleh Instansi Pusat/Pemerintah Daerah menunjukkan semakin tinggi kapabilitas Instansi Pusat/Pemerintah Daerah tersebut.

Penilaian evaluasi SPBE didasarkan pada data dan informasi yang diberikan oleh Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah melalui beberapa tahapan kegiatan, yaitu Penilaian Mandiri, Penilaian Dokumen, Penilaian Interview, serta Penilaian Visitasi (pada lokus tertentu).

## Tingkat Kematangan Penerapan SPBE

### Tingkat Kematangan pada Kapabilitas Proses



### Tingkat Kematangan pada Kapabilitas Fungsi



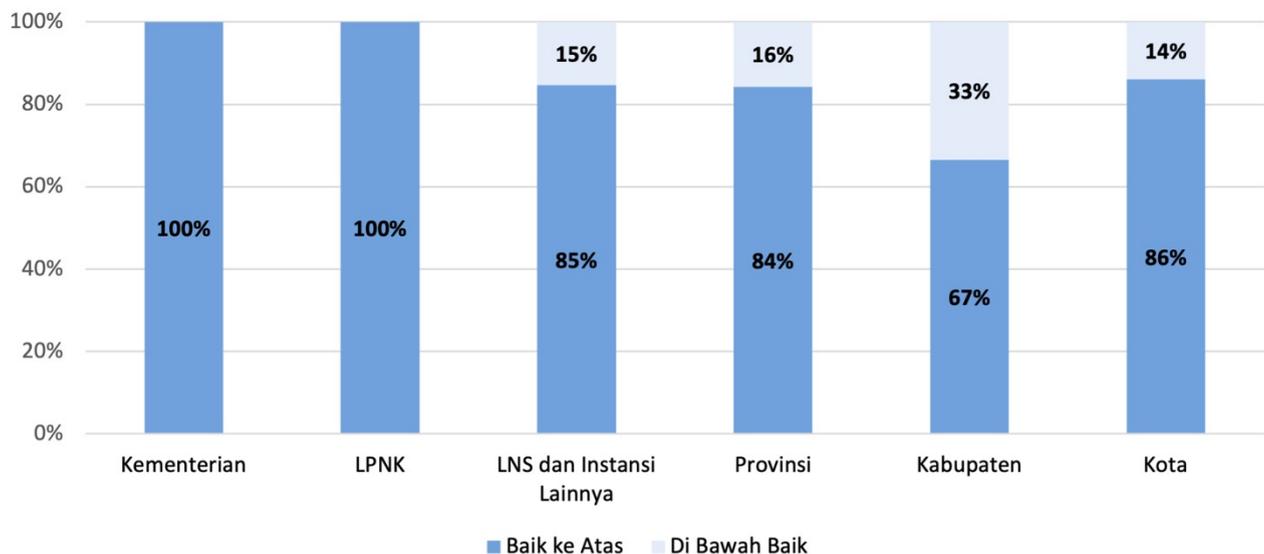
# EVALUASI SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK TAHUN 2024

Domain dan Aspek Penilaian	Bobot	Predikat Indeks SPBE																				
<b>Domain 1 - Kebijakan SPBE</b>	<b>13%</b>	<table border="1"> <thead> <tr> <th>NO</th> <th>NILAI INDEKS</th> <th>PREDIKAT</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>4,2 – 5,0</td> <td>Memuaskan</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>3,5 – &lt; 4,2</td> <td>Sangat Baik</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>2,6 – &lt; 3,5</td> <td>Baik *)</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>1,8 – &lt; 2,6</td> <td>Cukup</td> </tr> <tr> <td>5</td> <td>&lt; 1,8</td> <td>Kurang</td> </tr> </tbody> </table>	NO	NILAI INDEKS	PREDIKAT	1	4,2 – 5,0	Memuaskan	2	3,5 – < 4,2	Sangat Baik	3	2,6 – < 3,5	Baik *)	4	1,8 – < 2,6	Cukup	5	< 1,8	Kurang		
NO	NILAI INDEKS		PREDIKAT																			
1	4,2 – 5,0		Memuaskan																			
2	3,5 – < 4,2		Sangat Baik																			
3	2,6 – < 3,5		Baik *)																			
4	1,8 – < 2,6		Cukup																			
5	< 1,8		Kurang																			
Aspek 1 - Kebijakan Internal Tata Kelola SPBE	13%																					
<b>Domain 2 - Tata Kelola SPBE</b>	<b>25%</b>																					
Aspek 2 - Perencanaan Strategis	10%																					
Aspek 3 - Teknologi Informasi dan Komunikasi	10%																					
Aspek 4 - Penyelenggaraan SPBE	5%																					
<b>Domain 3 - Manajemen SPBE</b>	<b>16,5%</b>																					
Aspek 5 - Penerapan Manajemen SPBE	12%																					
Aspek 6 - Audit TIK	4,5%																					
<b>Domain 4 - Layanan SPBE</b>	<b>45,5%</b>																					
Aspek 7 - Layanan Administrasi Pemerintahan Berbasis Elektronik	27,5%																					
Aspek 8 - Layanan Publik	18%																					

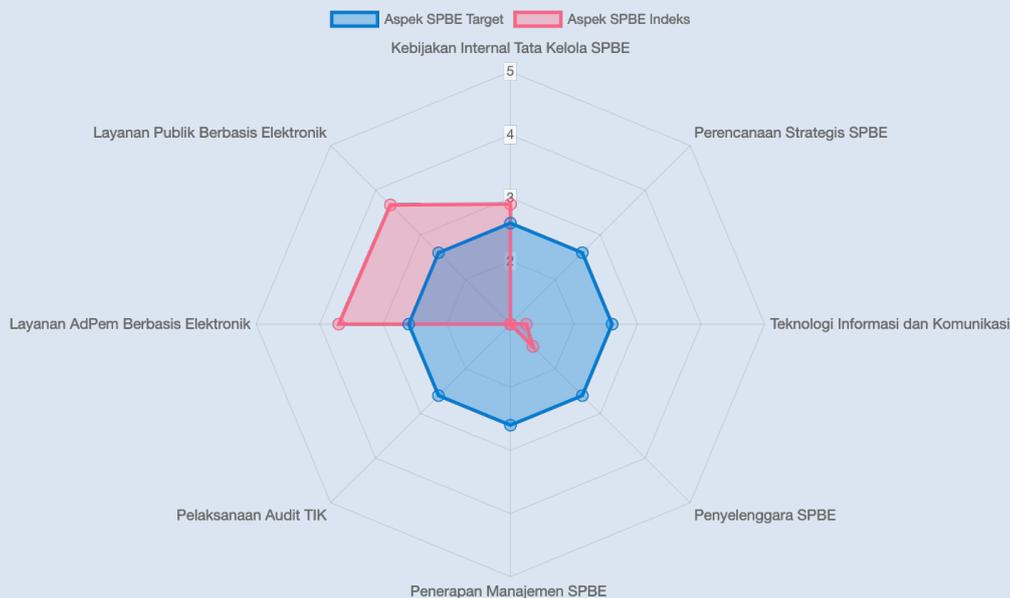
\*) Target penilaian: Predikat Baik (indeks minimal 2,6)

Indeks	Rata-Rata Nilai						
	Nasional	Kementerian	LPNK	LNS dan Instansi Lainnya	Provinsi	Kabupaten	Kota
<b>SPBE</b>	3,12	4,03	3,82	3,37	3,42	2,45	3,39
<b>Domain Kebijakan</b>	<b>3,36</b>	<b>4,28</b>	<b>4,01</b>	<b>3,61</b>	<b>3,61</b>	<b>2,51</b>	<b>3,64</b>
Kebijakan Internal Tata Kelola SPBE	3,36	4,28	4,01	3,61	3,61	3,23	3,64
<b>Domain Tata Kelola</b>	<b>2,62</b>	<b>3,92</b>	<b>3,65</b>	<b>3,11</b>	<b>3,07</b>	<b>1,69</b>	<b>2,94</b>
Perencanaan Strategis	2,41	3,74	3,68	3,01	2,84	1,54	2,60
Teknologi Informasi dan Komunikasi	2,75	4,06	3,75	3,11	3,26	1,76	3,10
Penyelenggaraan SPBE	2,80	4,00	3,40	3,32	3,14	1,85	3,31
<b>Domain Manajemen</b>	<b>1,86</b>	<b>2,87</b>	<b>2,61</b>	<b>2,31</b>	<b>2,17</b>	<b>1,13</b>	<b>2,03</b>
Penerapan Manajemen SPBE	1,91	2,96	2,68	2,38	2,19	1,16	2,09
Audit TIK	1,73	2,64	2,44	2,13	2,12	1,07	1,88
<b>Domain Layanan SPBE</b>	<b>3,78</b>	<b>4,44</b>	<b>4,26</b>	<b>3,81</b>	<b>3,98</b>	<b>3,32</b>	<b>4,05</b>
Administrasi Pemerintahan Berbasis Elektronik	3,77	4,35	4,20	3,90	3,95	3,40	3,99
Layanan Publik Berbasis Elektronik	3,80	4,58	4,36	3,67	4,04	3,21	4,15

**Distribusi Indeks SPBE Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah Berdasarkan Predikat Tahun 2024**



**Nilai Indeks SPBE, Domain, dan Aspek**



<b>Nama Indeks</b>	<b>Nilai 2024</b>
<b>SPBE</b>	<b>2,52</b>
<b>Domain Kebijakan SPBE</b>	<b>2,90</b>
<i>Kebijakan Internal Tata Kelola SPBE</i>	<i>2,90</i>
<b>Domain Tata Kelola SPBE</b>	<b>1,20</b>
<i>Perencanaan Strategis SPBE</i>	<i>1,00</i>
<i>Teknologi Informasi dan Komunikasi</i>	<i>1,25</i>
<i>Penyelenggara SPBE</i>	<i>1,50</i>
<b>Domain Manajemen SPBE</b>	<b>1,00</b>
<i>Penerapan Manajemen SPBE</i>	<i>1,00</i>
<i>Audit TIK</i>	<i>1,00</i>
<b>Domain Layanan SPBE</b>	<b>3,69</b>
<i>Layanan Administrasi Pemerintahan Berbasis Elektronik</i>	<i>3,70</i>
<i>Layanan Publik Berbasis Elektronik</i>	<i>3,67</i>

## KEKUATAN DAN KELEMAHAN

### A. Kebijakan Internal Tata Kelola SPBE

Pada Aspek Kebijakan, Kabupaten Pasangkayu telah mencapai Tingkat Kematangan 3 pada sebagian besar indikator, seperti Kebijakan Arsitektur SPBE, Peta Rencana SPBE, Manajemen Data, dan Layanan Pusat Data. Hal ini menunjukkan bahwa kebijakan-kebijakan dasar sudah mulai diterapkan secara konsisten dan terarah. Namun, indikator Kebijakan Pembangunan Aplikasi SPBE masih berada pada Tingkat Kematangan 2, mencerminkan adanya celah dalam pengaturan yang lebih mendetail untuk pembangunan aplikasi berbasis SPBE.

- **Kekuatan**  
Keunggulan utama Kabupaten Pasangkayu pada Aspek Kebijakan terlihat dari beberapa indikator yang mencapai Tingkat Kematangan 3, seperti Kebijakan Manajemen Keamanan Informasi dan Tim Koordinasi SPBE. Hal ini mencerminkan keseriusan pemerintah daerah dalam membangun kerangka kebijakan yang mendukung pengelolaan SPBE. Apresiasi layak diberikan atas upaya konsisten dalam menyusun kebijakan yang mulai menunjukkan keterpaduan di beberapa aspek penting.
- **Kelemahan**  
Kelemahan utama Kabupaten Pasangkayu pada Aspek Kebijakan terlihat pada Kebijakan Pembangunan Aplikasi SPBE, yang berada pada Tingkat Kematangan 2. Kebijakan ini belum sepenuhnya mengakomodasi kebutuhan pengembangan aplikasi secara terintegrasi dengan pedoman nasional. Untuk mengatasinya, Kabupaten Pasangkayu perlu memperbaiki kebijakan tersebut dengan mencakup seluruh referensi, pengaturan, dan proses pengembangan aplikasi SPBE agar lebih sesuai dengan kebutuhan unit kerja dan masyarakat. Selain itu, regulasi tambahan yang memperkuat peran kebijakan ini dalam mendorong pembangunan aplikasi berbasis SPBE perlu segera dirancang.

### B. Perencanaan Strategis SPBE

Pada Aspek Perencanaan Strategis, Kabupaten Pasangkayu masih berada pada Tingkat Kematangan 1 di semua indikator, seperti Arsitektur SPBE, Peta Rencana SPBE, dan Keterpaduan Rencana dan Anggaran SPBE. Hal ini menunjukkan bahwa dokumen-dokumen strategis belum tersedia, sehingga arah dan panduan implementasi SPBE belum terdefinisi secara formal.

- **Kekuatan**  
Tidak ditemukan kekuatan pada Aspek Perencanaan Strategis di Kabupaten Pasangkayu.
- **Kelemahan**  
Ketiadaan dokumen perencanaan strategis seperti Arsitektur SPBE dan Peta Rencana SPBE menjadi kelemahan utama di Kabupaten Pasangkayu. Tanpa dokumen ini, implementasi SPBE tidak memiliki dasar yang kuat untuk pengelolaan jangka panjang. Kabupaten Pasangkayu perlu segera menyusun dokumen-dokumen perencanaan tersebut dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan dan mengacu pada pedoman nasional. Langkah ini harus diikuti dengan pelatihan kepada unit kerja terkait untuk memastikan pemahaman dan penerapan yang sesuai.

### C. Teknologi Informasi dan Komunikasi

Sebagian besar indikator pada Aspek TIK di Kabupaten Pasangkayu, seperti Inovasi Proses Bisnis SPBE, Pembangunan Aplikasi SPBE, dan Sistem Penghubung Layanan, berada pada Tingkat Kematangan 1. Namun, indikator Layanan Jaringan Intra telah mencapai Tingkat Kematangan 2, mencerminkan adanya langkah awal dalam pengelolaan jaringan internal.

- **Kekuatan**  
Tidak ditemukan kekuatan signifikan pada Aspek TIK di Kabupaten Pasangkayu.
- **Kelemahan**  
Kelemahan pada Aspek TIK terlihat dari rendahnya tingkat kematangan sebagian besar indikator. Tidak adanya inovasi proses bisnis, pembangunan aplikasi SPBE yang belum optimal, serta minimnya integrasi jaringan dan sistem penghubung layanan menjadi tantangan utama. Kabupaten Pasangkayu perlu mempercepat pengembangan infrastruktur teknologi dan integrasi sistem, termasuk layanan jaringan intra dan sistem penghubung layanan. Selain itu, inovasi proses bisnis harus diprioritaskan untuk mendukung efisiensi operasional.

### D. Penyelenggara SPBE

Pada Aspek Penyelenggara SPBE, indikator Pelaksanaan Tim Koordinasi SPBE berada pada Tingkat Kematangan 2, sedangkan Kolaborasi Penerapan SPBE masih pada Tingkat Kematangan 1. Ini mencerminkan bahwa meskipun sudah ada tim koordinasi, perannya belum optimal, dan kolaborasi antarunit kerja masih sangat terbatas.

- Kekuatan  
Tidak ditemukan kekuatan signifikan pada Aspek Penyelenggara SPBE di Kabupaten Pasangkayu.
- Kelemahan  
Kelemahan utama terlihat pada kolaborasi antarunit kerja yang masih rendah. Kabupaten Pasangkayu perlu memperkuat peran tim koordinasi SPBE dengan menetapkan program kerja formal yang melibatkan semua unit kerja. Selain itu, kolaborasi dengan instansi pusat, daerah lain, dan pihak eksternal seperti perguruan tinggi atau masyarakat perlu ditingkatkan untuk mempercepat penerapan SPBE yang lebih terintegrasi.

#### E. Penerapan Manajemen SPBE

Seluruh indikator pada Aspek Penerapan Manajemen SPBE di Kabupaten Pasangkayu berada pada Tingkat Kematangan 1, seperti manajemen risiko, keamanan informasi, data, aset TIK, dan kompetensi SDM. Hal ini menunjukkan bahwa penerapan manajemen belum dilakukan secara terencana dan terstruktur.

- Kekuatan  
Tidak ditemukan kekuatan signifikan pada Aspek Penerapan Manajemen SPBE di Kabupaten Pasangkayu.
- Kelemahan  
Ketiadaan manajemen yang terarah menjadi kelemahan utama pada aspek ini. Kabupaten Pasangkayu perlu segera menyusun program penerapan manajemen yang mencakup pengelolaan risiko, keamanan informasi, data, dan aset TIK, dengan mengacu pada pedoman nasional. Pelatihan kompetensi SDM juga menjadi prioritas untuk memastikan implementasi yang lebih efektif.

#### F. Pelaksanaan Audit TIK

Semua indikator pada Aspek Audit TIK di Kabupaten Pasangkayu berada pada Tingkat Kematangan 1, menunjukkan bahwa pelaksanaan audit belum dilakukan.

- Kekuatan  
Tidak ditemukan kekuatan pada Aspek Audit TIK di Kabupaten Pasangkayu.
- Kelemahan  
Ketiadaan pelaksanaan audit meningkatkan risiko keamanan dan keandalan sistem. Kabupaten Pasangkayu perlu merancang dan melaksanakan audit secara rutin, meliputi infrastruktur, aplikasi, dan keamanan SPBE, dengan mengacu pada pedoman dari BRIN dan BSSN. Setiap temuan audit juga harus ditindaklanjuti dengan program perbaikan yang terencana.

#### G. Layanan Administrasi Pemerintahan Berbasis Elektronik

Sebagian besar indikator pada Aspek Layanan Administrasi di Kabupaten Pasangkayu, seperti Layanan Perencanaan, Penganggaran, Keuangan, dan Kearsipan Dinamis, berada pada Tingkat Kematangan 4. Indikator lainnya, seperti Layanan Kinerja Pegawai dan Layanan Akuntabilitas Kinerja Organisasi, berada pada Tingkat Kematangan 3.

- Kekuatan  
Keberhasilan pada indikator-indikator yang mencapai Tingkat Kematangan 4 menunjukkan pengelolaan administrasi yang baik dan terintegrasi, yang mendukung efisiensi operasional dan tata kelola yang lebih baik. Kabupaten Pasangkayu patut diapresiasi atas kemajuan pada aspek ini.
- Kelemahan  
Beberapa indikator yang berada pada Tingkat Kematangan 3 menunjukkan masih adanya ruang untuk penguatan interoperabilitas sistem. Kabupaten Pasangkayu perlu memastikan bahwa seluruh layanan administrasi dapat terintegrasi secara penuh untuk meningkatkan efisiensi.

#### H. Layanan Publik Berbasis Elektronik

Indikator seperti Layanan Publik Sektor dan Layanan Pengaduan Pelayanan Publik di Kabupaten Pasangkayu berada pada Tingkat Kematangan 4, mencerminkan pengelolaan layanan publik yang cukup baik. Namun, indikator seperti Layanan Data Terbuka dan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) berada pada Tingkat Kematangan 3.

- Kekuatan  
Keberhasilan pada Layanan Publik Sektor dan Layanan Pengaduan Pelayanan Publik menunjukkan tingkat kematangan yang tinggi, memberikan aksesibilitas dan kemudahan layanan kepada masyarakat. Apresiasi diberikan kepada Kabupaten Pasangkayu atas keberhasilan ini.
- Kelemahan

Tidak ada Indikator yang menjadi kelemahan pada aspek ini. Namun, Indikator pada Tingkat Kematangan 3, seperti Layanan Data Terbuka dan JDIH, memerlukan penguatan integrasi sistem untuk memberikan akses informasi yang lebih baik kepada masyarakat. Kabupaten Pasangkayu perlu meningkatkan kemampuan layanan ini agar lebih interaktif dan kolaboratif.

## REKOMENDASI

Secara prinsip, Kabupaten Pasangkayu telah memulai langkah dalam penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE), namun masih memerlukan perbaikan yang signifikan pada beberapa aspek penting. Berdasarkan hasil evaluasi SPBE, Kabupaten Pasangkayu memperoleh nilai total indeks SPBE sebesar 2,5195, yang termasuk dalam predikat cukup. Penerapan SPBE di Kabupaten Pasangkayu menunjukkan kekuatan pada aspek layanan, terutama administrasi dan publik, namun menghadapi tantangan besar pada kebijakan, tata kelola, manajemen, dan audit TIK.

Keunggulan penerapan SPBE di Kabupaten Pasangkayu terlihat pada Aspek Layanan Administrasi Pemerintahan Berbasis Elektronik (3,70) dan Layanan Publik Berbasis Elektronik (3,67). Layanan administrasi mencakup perencanaan, penganggaran, keuangan, dan pengadaan barang dan jasa yang telah berjalan dengan baik. Layanan publik, seperti pengaduan pelayanan publik dan layanan sektor lainnya, menunjukkan responsivitas yang baik terhadap kebutuhan masyarakat. Apresiasi diberikan kepada Kabupaten Pasangkayu atas pencapaian ini, yang menunjukkan bahwa pemerintah daerah mampu menyediakan layanan yang lebih efisien dan terintegrasi kepada masyarakat.

Namun, Kabupaten Pasangkayu menghadapi kelemahan signifikan pada Aspek Perencanaan Strategis SPBE (1,00), Manajemen SPBE (1,00), dan Pelaksanaan Audit TIK (1,00). Rendahnya tingkat kematangan pada Aspek Perencanaan Strategis mencerminkan belum tersusunnya dokumen penting seperti Arsitektur SPBE dan Peta Rencana SPBE, yang mengakibatkan tidak adanya panduan strategis untuk implementasi SPBE. Pada Aspek Manajemen SPBE, tidak adanya pengelolaan risiko, data, aset TIK, dan kompetensi SDM yang terarah menghambat pengelolaan yang lebih efisien. Selain itu, Aspek Audit TIK yang belum dilaksanakan meningkatkan risiko terhadap keamanan dan keandalan sistem.

Untuk mengatasi kelemahan ini, Kabupaten Pasangkayu perlu segera menyusun dokumen perencanaan strategis yang mencakup seluruh referensi dan domain yang relevan. Selain itu, penerapan manajemen yang lebih terarah, seperti pengelolaan risiko dan keamanan informasi, harus menjadi prioritas utama. Audit TIK perlu dilakukan secara rutin dengan mengacu pada pedoman dari BRIN dan BSSN, dengan melibatkan auditor internal maupun eksternal bersertifikasi untuk memastikan transparansi dan akuntabilitas.

Kabupaten Pasangkayu patut diapresiasi atas keberhasilannya dalam mengelola Layanan Administrasi dan Layanan Publik yang menunjukkan tingkat kematangan tinggi. Namun, untuk meningkatkan nilai indeks SPBE secara keseluruhan, diperlukan langkah-langkah strategis pada aspek lainnya.

Pada Aspek Kebijakan, reviu secara berkala dan revisi kebijakan dapat seterusnya dilakukan agar selaras dengan perkembangan kondisi dan kebutuhan terkini. Reviu ini dapat memastikan bahwa kebijakan yang diterapkan tetap relevan dan efektif dalam mendukung penerapan SPBE di Kabupaten Pasangkayu.

Pada Aspek Perencanaan Strategis, dokumen seperti Arsitektur SPBE dan Peta Rencana SPBE perlu segera disusun. Dokumen ini harus mencakup semua referensi terkait untuk memastikan keterpaduan antara perencanaan strategis dan penganggaran. Pelatihan kepada unit kerja terkait juga diperlukan untuk meningkatkan pemahaman terhadap perencanaan strategis dan implementasinya.

Pada Aspek Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK), diperlukan penguatan infrastruktur teknologi dan inovasi proses bisnis. Layanan jaringan intra dan sistem penghubung layanan harus ditingkatkan untuk mendukung efisiensi operasional dan integrasi antarunit kerja. Selain itu, pembangunan aplikasi SPBE perlu dilakukan dengan pendekatan yang lebih inovatif dan sesuai dengan kebutuhan daerah.

Pada Aspek Penyelenggara SPBE, Tim Koordinasi SPBE harus diberikan program kerja formal yang jelas dan terarah, melibatkan semua unit kerja untuk memastikan pelaksanaan yang efektif. Selain itu, kolaborasi antarunit kerja dengan instansi pusat, daerah lain, dan masyarakat perlu ditingkatkan untuk mempercepat penerapan SPBE yang lebih terpadu.

Pada Aspek Penerapan Manajemen SPBE, program pengelolaan risiko, keamanan informasi, data, dan aset TIK harus disusun secara terarah dan terencana. Kompetensi SDM juga harus diperkuat melalui pelatihan yang relevan agar setiap unit kerja dapat memahami dan menjalankan pedoman SPBE dengan lebih baik.

Pada Aspek Audit TIK, perlu dirancang pelaksanaan audit rutin untuk infrastruktur, aplikasi, dan keamanan SPBE. Audit ini harus mengacu pada pedoman nasional dari BRIN dan BSSN, melibatkan auditor internal maupun eksternal yang bersertifikasi. Setiap temuan audit juga harus ditindaklanjuti dengan program perbaikan yang konkret dan berkelanjutan.

Secara keseluruhan, evaluasi rutin dan peningkatan kompetensi SDM harus dilakukan untuk mendukung implementasi SPBE yang lebih efektif. Dengan langkah-langkah ini, Kabupaten Pasangkayu diharapkan dapat meningkatkan nilai indeks SPBE dan mencapai predikat yang lebih baik pada evaluasi mendatang.

## Perolehan Nilai Tingkat Kematangan Indikator

*Target nilai tingkat kematangan untuk setiap indikator adalah minimal 3 (tiga)*

No	Indikator	Nilai Tingkat Kematangan 2024
1	Tingkat Kematangan Kebijakan Internal Arsitektur SPBE Instansi	3
2	Tingkat Kematangan Kebijakan Internal Peta Rencana SPBE Instansi	3
3	Tingkat Kematangan Kebijakan Internal Manajemen Data	3
4	Tingkat Kematangan Kebijakan Internal Pembangunan Aplikasi SPBE	2
5	Tingkat Kematangan Kebijakan Internal Layanan Pusat Data	3
6	Tingkat Kematangan Kebijakan Internal Layanan Jaringan Intra Instansi	3
7	Tingkat Kematangan Kebijakan Internal Penggunaan Sistem Penghubung	3
8	Tingkat Kematangan Kebijakan Internal Manajemen Keamanan Informasi	3
9	Tingkat Kematangan Kebijakan Internal Audit TIK	3
10	Tingkat Kematangan Kebijakan Internal Tim Koordinasi SPBE Instansi	3
11	Tingkat Kematangan Arsitektur SPBE Instansi Pusat/Pemerintah Daerah	1
12	Tingkat Kematangan Peta Rencana SPBE Instansi Pusat/Pemerintah	1
13	Tingkat Kematangan Keterpaduan Rencana dan Anggaran SPBE	1
14	Tingkat Kematangan Inovasi Proses Bisnis SPBE	1
15	Tingkat Kematangan Pembangunan Aplikasi SPBE	1
16	Tingkat Kematangan Layanan Pusat Data	1
17	Tingkat Kematangan Layanan Jaringan Intra Instansi Pusat/Pemerintah	2
18	Tingkat Kematangan Penggunaan Sistem Penghubung Layanan Instansi	1
19	Tingkat Kematangan Pelaksanaan Tim Koordinasi SPBE Instansi	2
20	Tingkat Kematangan Kolaborasi Penerapan SPBE	1
21	Tingkat Kematangan Penerapan Manajemen Risiko SPBE	1
22	Tingkat Kematangan Penerapan Manajemen Keamanan Informasi	1
23	Tingkat Kematangan Penerapan Manajemen Data	1
24	Tingkat Kematangan Penerapan Manajemen Aset TIK	1
25	Tingkat Kematangan Penerapan Kompetensi Sumber Daya Manusia	1
26	Tingkat Kematangan Penerapan Manajemen Pengetahuan	1
27	Tingkat Kematangan Penerapan Manajemen Perubahan	1
28	Tingkat Kematangan Penerapan Manajemen Layanan SPBE	1
29	Tingkat Kematangan Pelaksanaan Audit Infrastruktur SPBE	1
30	Tingkat Kematangan Pelaksanaan Audit Aplikasi SPBE	1
31	Tingkat Kematangan Pelaksanaan Audit Keamanan SPBE	1
32	Tingkat Kematangan Layanan Perencanaan	4
33	Tingkat Kematangan Layanan Penganggaran	4
34	Tingkat Kematangan Layanan Keuangan	4
35	Tingkat Kematangan Layanan Pengadaan Barang dan Jasa	4
36	Tingkat Kematangan Layanan Kepegawaian	4
37	Tingkat Kematangan Layanan Kearsipan Dinamis	4
38	Tingkat Kematangan Layanan Pengelolaan Barang Milik Negara / Daerah	3
39	Tingkat Kematangan Layanan Pengawasan Internal Pemerintah	4
40	Tingkat Kematangan Layanan Akuntabilitas Kinerja Organisasi	3
41	Tingkat Kematangan Layanan Kinerja Pegawai	3

42	Tingkat Kematangan Layanan Pengaduan Pelayanan Publik	4
43	Tingkat Kematangan Layanan Data Terbuka	3
44	Tingkat Kematangan Layanan Jaringan Dokumentasi dan Informasi	3
45	Tingkat Kematangan Layanan Publik Sektor 1	4
46	Tingkat Kematangan Layanan Publik Sektor 2	4
47	Tingkat Kematangan Layanan Publik Sektor 3	4



**panrb**

KEMENTERIAN  
PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA  
DAN REFORMASI BIROKRASI



*Sinergi untuk Indonesia Maju*

Deputi Bidang Kelembagaan dan Tata Laksana  
Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi  
2024